

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 19 dan 20 Juli 2025 diselenggarakan sebuah konser musik bertajuk Ruang Bermusik 2025 yang digelar di Lanud Wiriadinata Kota Tasikmalaya. Konser ini menghadirkan berbagai musisi nasional seperti Maliq & D'Essentials, Wisnu Santika, Adnan Veron x HBRP, Perunggu, Nadin Amizah, Hindia, Lomba Sihir, dan Feast. Namun, penyelenggaraan konser tersebut menuai penolakan tegas dari organisasi masyarakat islam yang tergabung dalam Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Almumtaz) yang menentang rencana penampilan tiga grup musik Hindia, Lomba Sihir, dan Feast. Penolakan tersebut didasarkan pada tuduhan bahwa grup musik ini membawa simbolisme dan pemahaman seperti indikasi satanik dan simbol-simbol yang dianggap melanggar syariat yang dinilai bertentangan dengan identitas dan nilai-nilai keislaman dan kesantian yang melekat pada Kota Tasikmalaya (KOMPAS.com, 2025).

Ketua Almumtaz Hilmi Afwan menyampaikan bahwa pihaknya menolak secara terbuka rencana penyelenggaraan konser tersebut karena dinilai mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat Kota Tasikmalaya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pokok persoalan terletak pada adanya dugaan bahwa beberapa grup musik yang akan tampil dianggap memiliki kecenderungan satanik, melanggar norma syariat islam, serta menampilkan simbol-simbol seperti dajal dan baphomet yang dinilai tidak sejalan dengan identitas religius Kota Santri. Sikap penolakan Almumtaz didasari oleh

kekhawatiran terhadap potensi pengaruh simbolik dan ideologis yang dipandang dapat mengancam nilai-nilai religius masyarakat Tasikmalaya (Detikpop, 2025). Ketua Almuntaaz juga menyatakan bahwa penggalan lirik "*Ku doakan kita semua masuk neraka*" dari lagu Matahari Tenggelam oleh musisi Hindia dinilai bertentangan dengan nilai-nilai religius dan mempertanyakan maknanya secara mendalam di berbagai media sosial. (News Tasikmalaya, 2025).

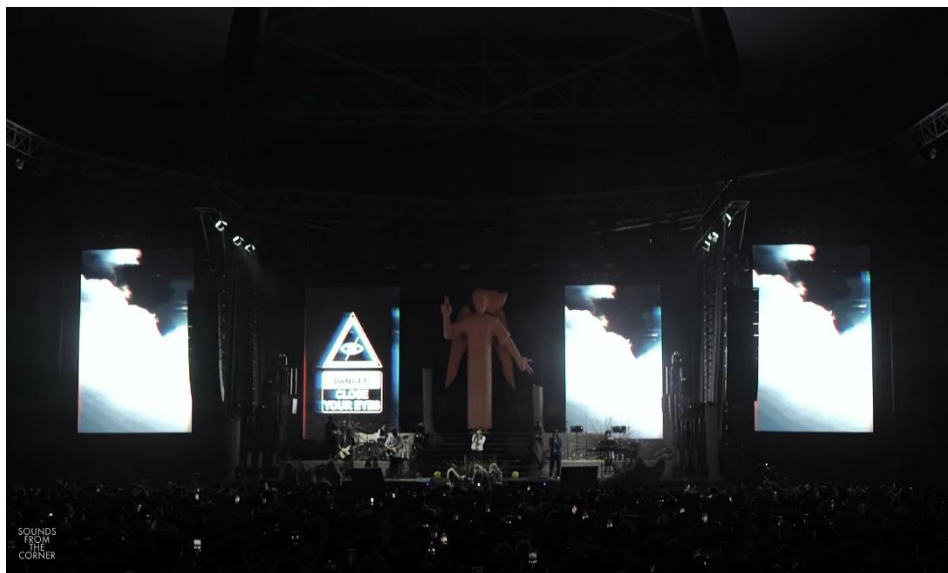
Hindia merupakan grup band yang digagas oleh musisi Daniel Baskara Putra setelah sebelumnya dikenal sebagai vokalis utama band Feast yang muncul pada tahun 2014 dengan karya-karya bernuansa sosial dan politis. Melalui Hindia, yang dibentuk pada tahun 2018 Baskara menghadirkan ekspresi musikal yang lebih personal dengan gaya alternatif serta lirik reflektif yang menggambarkan dinamika kehidupan sehari-hari dan pengalaman emosional generasi muda (Aulia dan Rahmadhani, 2025). Selain itu, bersama sejumlah rekannya yaitu Natasha Udu, Rayhan Noor, Enrico Octaviano, dan Tristan Juliano Baskara juga menggagas grup band Lomba Sihir yang membawa pembaruan dalam industri musik Indonesia melalui karya-karya inovatif dan karakter musikal yang khas, sehingga turut memperkaya perkembangan musik di Indonesia (Narasi, 2025).

Kehadiran grup band Hindia di Kota Tasikmalaya bukanlah menjadi sesuatu yang baru, Pada 10 September 2023 Hindia pernah menjadi salah satu pengisi acara musik *Now Playing Festival* bersama Clun Racun Dangdut yang diselenggarakan di Lapangan Parkir Transmart. Kehadiran tersebut kala itu berlangsung tanpa penolakan berarti dari masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa ruang ekspresi musik populer masih dapat diterima di tengah kultur religius Kota Tasikmalaya.

Situasi yang berbeda terjadi pada tahun 2025, penampilan Hindia dalam konser Ruang Bermusik 2025 justru mendapatkan penolakan dari organisasi masyarakat islam yang tergabung dalam Almuntaaz (Kabar Priangan, 2025).

Penyelenggara Konser Ruang Bermusik 2025 Rizki Ginanjar Saputra menjelaskan bahwa tuduhan mengenai keterkaitan grup musik Hindia dengan unsur satanisme tidak memiliki dasar yang dapat dibenarkan secara faktual. Tuduhan tersebut telah berulang kali dibantah secara terbuka oleh Daniel Baskara Putra melalui berbagai media nasional dan podcast populer. Isu tersebut berawal dari kesalahpahaman terhadap aksi panggung Hindia pada peluncuran album Lagi Pula Hidup Akan Berakhir tahun 2023 pada lagu Matahari Terbenam yang ditafsirkan sebagian pihak sebagai simbol pemujaan setan (Times Indonesia, 2025).

Gambar 1. 1. Layout Panggung Hindia



Sumber: Youtube (Corner, 2024)

Upaya mediasi terkait penyelenggaraan konser Ruang Bermusik 2025 dilakukan melalui serangkaian rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh

Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Moh. Faruk Rozi yang menegaskan bahwa kewenangan pemberian izin konser berada pada Polda Jawa Barat sementara Polres Tasikmalaya Kota hanya berperan memberikan rekomendasi. Dalam prosesnya, telah dilakukan empat kali pertemuan yang melibatkan tokoh agama, elemen masyarakat, ketua MUI Kota Tasikmalaya, alim ulama, pimpinan ormas islam, pihak penyelenggara, serta perwakilan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian disampaikan kepada Polda Jawa Barat sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kelanjutan izin pelaksanaan konser (Times Indonesia, 2025).

Dengan mempertimbangkan dari hasil mediasi tersebut pada akhirnya penampilan Hindia, Lomba Sihir, dan Feast pada Ruang Bermusik 2025 tidak dapat dilaksanakan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dinamika yang berkembang serta berbagai faktor yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara. Pihak panitia menyadari tingginya antusiasme audiens untuk menyaksikan ketiga musisi tersebut sekaligus memahami bahwa ekspektasi tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan ekosistem musik di daerah (Detikjabar, 2025).

Menanggapi dinamika tersebut, muncul beragam reaksi dari elemen masyarakat seperti Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Tasikmalaya Ardiana Nugraha yang menyoroti akar persoalan terkait polemik konser musik tidak sepenuhnya bersumber dari kebijakan eksekutif melainkan berakar pada salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya yakni Peraturan Daerah (Perda) tentang

Tata Nilai. Perda tersebut dinilai menjadi instrumen yang berimplikasi pada pembatasan ruang ekspresi publik, khususnya bagi generasi muda dan pelaku seni. Hal ini terjadi karena Perda Tata Nilai memiliki ruang tafsir yang terlalu luas sehingga kerap dijadikan legitimasi untuk membatasi aktivitas seni dan budaya atas dasar moralitas atau norma sosial (Priangan.com, 2025).

Respon lain disampaikan oleh Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Tasikmalaya Bubung Nizar yang menyampaikan bahwa keberagaman ekspresi budaya dan kreativitas generasi muda merupakan bagian dari dinamika sosial yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dituntut untuk mampu mengelola keragaman tersebut secara arif, sehingga ruang-ruang kreativitas tidak serta-merta dibatasi dengan dalih moralitas semata. Kemudian dialog dan musyawarah perlu dikedepankan sebagai mekanisme penyelesaian perbedaan dibandingkan dengan pendekatan pelarangan yang justru berpotensi menimbulkan ketegangan sosial (Times Indonesia, 2025).

Dinamika tersebut menunjukkan adanya jurang pemisah antara gerakan sosial yang berupaya menjaga kemurnian identitas religius kota dengan realitas geliat industri kreatif dan kebebasan berekspresi budaya populer yang digandrungi oleh kaum muda. Peristiwa ini berujung pada pencoretan Hindia, Feast, dan Lomba Sihir dari daftar penampil setelah proses mediasi yang menjadi titik fokus krusial untuk menganalisis bagaimana identitas sebuah kota dinegosiasikan, dipertahankan, dan bahkan diperebutkan dalam ruang publik kontemporer.

Kota Tasikmalaya yang dikenal luas memiliki nilai dan karakteristik keislaman yang kuat bahkan dikenal dengan Kota Santri tercermin dari tingginya

jumlah pesantren yang tersebar di berbagai kecamatan. Dari tingginya jumlah pesantren tersebut akan menghasilkan ulama, ustadz, mubaligh, dai, ajengan, yang berpengaruh kepada nilai dan norma masyarakat setempat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024) jumlah pesantren di Kota Tasikmalaya mencapai 278 lembaga dengan 23.965 Santri yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat maupun luar daerah serta 2.530 Pengajar yang tersebar di 10 Kecamatan.

Tabel 1. 1 Tabel Sebaran Pesantren di Kota Tasikmalaya:

No	Kecamatan (District)	Pesantren (Islamic Boarding School)	Jumlah Ustadz (Teacher)	Santri (Student)
1.	Kawalu	45	393	2870
2.	Tamansari	47	326	2514
3.	Cibereum	40	355	7823
4.	Purbaratu	25	222	1147
5.	Tawang	13	90	969
6.	Cihideung	27	428	2461
7.	Mangkubumi	41	307	2793
8.	Indihiang	10	76	574
9.	Bungursari	18	200	1372
10.	Cipedes	12	133	1442
Jumlah		278	2530	23965

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024)

Dengan basis yang kuat tersebut pesantren tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga menjadi fondasi dalam melestarikan nilai religius suatu wilayah (Mujahidin, 2021). Keberadaan Pesantren yang banyak juga memiliki peran bukan hanya sebagai institusi pendidikan, melainkan juga pusat pembentukan nilai sosial, moral, dan keagamaan yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Identitas ini membentuk cara pandang masyarakat dalam

merespons berbagai dinamika sosial, termasuk hadirnya budaya populer yang semakin digandrungi generasi muda (Azhar dan Haryanto, 2024).

Dalam konteks inilah Almumtaz merasa memiliki legitimasi moral untuk mengambil sikap tegas terhadap penyelenggaraan konser Ruang Bermusik 2025. Dalam konser Ruang Bermusik 2025 Almumtaz tampil sebagai aktor yang menyuarakan penolakan terhadap grup musik Hindia, Lomba Sihir, dan Feast dengan alasan adanya simbolisme dan nilai yang dianggap tidak sejalan dengan identitas religius kota. Kehadiran gerakan ini menimbulkan respon beragam, disatu sisi dipandang sebagai upaya menjaga nilai-nilai kesantian, namun di sisi lain juga memperlihatkan adanya perbedaan orientasi dengan sebagian generasi muda yang lebih terbuka pada ekspresi budaya populer. Situasi ini memperlihatkan dinamika sosial yang kompleks, dimana nilai religius yang telah lama melekat berinteraksi dengan perkembangan gaya hidup serta preferensi kultural masyarakat kontemporer.

Almumtaz mulai menonjol sejak tahun 2014 ketika secara organisatoris berdiri pada 1 Juli 2014 yang diprakarsai oleh para aktivis muda lintas organisasi Islam Tasikmalaya. Aliansi ini menjadi forum silaturahmi bagi para aktivis ormas, lembaga, dan jamaah Islam di Tasikmalaya dalam menyamakan visi dan misi gerakan dakwah penegakan syariat Islam, *amar ma'ruf nahi munkar*, solidaritas muslim, dan *jihad fi sabilillah*. Almumtaz merupakan gabungan dari 21 ormas, yaitu Brigade Thaliban, DPW FPI Tasikmalaya, Majelis Mujahidin, Jamaah Ansharusy Syariah, Persatuan Islam (Persis), Persatuan Ummat Islam (PUI), Lembaga Pengawasan dan Pengembangan Umat (LPPU), Forum Pengajian Imam

Syafi'i, Forsil, Brigade Syuhada, Brigade Hizbullah, Brigade PERSIS, Pemuda Bulan Bintang, Pemuda Persis, Pemuda Muhammadiyah, Laskar Penghafal Al-Qur'an Darul Ilmi, Laskar Pembela Islam, Laskar Mujahidin, BKPRMI Kecamatan Mangkubumi, Brigade Santri Wustho, dan Majelis Ilmu Al Fathonah (Hamim, 2021).

Dari 21 organisasi yang memprakasai munculnya Almumtaz, pada penelitian ini akan difokuskan pada tiga entitas besar yang menjadi pilar penyangga Almumtaz, yakni Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansharu Syariah (JAS) yang pada awal nya bernama Jamaah Ansharu Tauhid (JAT), dan satu organisasi lokal Brigade Thaliban. Ketiga nya dipilih karena dinilai memiliki peran yang kuat dalam mewarnai dinamika pergerakan baik sebelum tergabung dalam Almumtaz ataupun setelahnya.

Yang pertama, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang secara resmi dibentuk melalui Kongres Mujahidin I yang berlangsung di Yogyakarta pada Agustus tahun 2000. Organisasi yang dipimpin oleh 32 tokoh Islam yang tergabung dalam *Ahl al-Hall wa al-Aqdi* (AHWA)¹ ini memiliki markas pusat di Kotagede dengan jaringan yang tersebar hingga ke mancanegara. Prinsip utama perjuangan MMI diawali dengan konsep *ibda' binafsi*, yakni penegakan syariat Islam yang

¹ *Ahl al-Hall wa al-Aqdi* (AHWA) adalah tokoh-tokoh Islam (versi MMI) yang ditunjuk Kongres Mujahidin untuk mengemban amanat kongres. *Ahl al-Hall wa al-Aqdi* tersebut dikoordinir oleh seorang ketua yang disebut sebagai Amirul Mujahidin. Sedangkan dalam operasionalnya AHWA memiliki pengurus harian dan forum pleno yang keduanya dipimpin oleh amirul mujahidin. Adapun dalam bentuk melaksanakan tugasnya AHWA membentuk Lajnah Tanfiziyah di Pusat, lajnah perwakilan wiayah Provinsi, kabupaten-kotamadya. Hartono, "Kontestasi Penerapan Syariat Islam di Indonesia dalam Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Tesis, Pasca Sarjana UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, (2010) (Qomaruzzaman, 2013).

dimulai dari kesadaran diri setiap individu Muslim sebelum kemudian diperluas ke dalam sistem sosial yang lebih besar (Qomaruzzaman, 2013).

Majelis Mujahidin Indonesia memiliki misi utama mewujudkan formalisasi agama dalam sistem sosial politik Indonesia melalui penegakan syariat Islam secara menyeluruh atau *kaffah* di semua bidang kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan masalah individual ritual (*mahdhah*), atau masalah sosial kenegaraan seperti memilih pemimpin, menetapkan hukum positif, dan mengatur kehidupan ekonomi negara. MMI memandang bahwa aturan Islam harus diterapkan secara murni dan bersih dari kemusyrikan², mencakup segala aspek kehidupan mulai dari urusan ibadah ritual hingga ranah kenegaraan. Hal ini meliputi keterlibatan syariat dalam menentukan kepemimpinan, penetapan hukum positif, hingga pengaturan sistem ekonomi negara sebagai bagian dari komitmen untuk menjadikan Islam sebagai landasan kehidupan bermasyarakat (Qomaruzzaman, 2013).

Majelis Mujahiddin memperjuangkan formalisasi syariat dalam institusi negara atau pemerintahan hingga ke pembentukan Negara Khilafah karena memiliki sistem keyakinan atau pandangan dunia dalam paham integralisme Islam. Keyakinan dan pemahaman ajaran Islam tersebut harus secara total dan harus sebagai satu totalitas dalam seluruh aspek kehidupan Muslim baik secara individual maupun kolektif, termasuk dalam kehidupan negara. Konsep-konsep pokok yang dikembangkan MMI ialah penegakan syariat Islam, Negara Islam atau Negara

² Salah satu bentuk kemusyrikan yang dimaksud MMI ialah sistem demokrasi sekuler yang meninggalkan/menolak Allah swt sebagai sumber hukum (Qomaruzzaman, 2013).

Khilafah atau Kekhalifahan Islam, *Dār al-Islām* versus *Dar al-Harb*, Sistem Islam, Ideologi Islam, dan lain-lain. Gerakan MMI ini bukan hanya meyakini syariat Islam sebagai tuntunan Islam yang mutlak kebenarannya, tetapi juga wajib dijalankan oleh setiap Muslim dalam seluruh aspek kehidupan tanpa kecuali. Tidak ada satu hal urusan dunia yang luput dari ajaran atau syariat Islam. Karena itu, setiap Muslim yang menentang syariat Islam, termasuk menolak penerapannya secara formal dalam kehidupan negara, tergolong dalam kategori murtad atau kafir secara *I'tiqad* (keyakinan akidah). Bersamaan dengan ini, MMI juga menentang ajaran dan ideologi lain yang bertentangan dengan syariat Islam (Qomaruzzaman, 2013).

Bagi Majelis Mujahidin, meyakinkan kepada seluruh umat islam bahwa melaksanakan syariat Islam secara kaffah adalah wajib bagi setiap muslim, bahkan islam mengharuskan umatnya mendirikan negara agar syariah islam dapat berfungsi dengan baik, dalam kehidupan orang seorang, masyarakat, bangsa dan negara (Qomaruzzaman, 2013).

Kedua, Jamaah Ansharu Syariah yang pada awal nya merupakan Jamaah Ansharu Tauhid. Jamaah Ansharu Tauhid (JAT) pada mulanya muncul sebagai kelompok yang memisahkan diri dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Meskipun lahir dari perpecahan tersebut, basis massa JAT tidak hanya terbatas pada mantan anggota MMI, melainkan juga berhasil menarik dukungan luas dari berbagai lingkaran jamaah lama yang sudah ada sebelumnya. Kekuatan JAT semakin berkembang berkat bergabungnya elemen-elemen pecahan dari Jamaah Islamiyah (JI) serta faksi-faksi sempalan dari Darul Islam atau Negara Islam Indonesia (DI/NII). Penyatuan berbagai faksi ini menciptakan sebuah jaringan

lintas kelompok yang solid, yang menjadi fondasi utama dukungan bagi organisasi tersebut sejak awal pendiriannya (Abdullah, 2018).

Berpisahanya kelompok ini (JAT) dari MMI bermula saat Abu Bakar Baasyir menggantikan posisi Abdullah Sungkar sebagai Amir Jemaah Islamiyah (JI) pada tahun 1999, yang secara bersamaan juga terpilih memimpin Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Namun, kepemimpinan ganda ini memicu ketegangan internal di tubuh JI Abu Bakar Baasyir menginginkan transformasi gerakan menjadi dakwah terbuka, sebuah gagasan yang ditentang keras oleh kelompok pro kerahasiaan (*tanzhim sirri*). Akibat perbedaan strategi tersebut, Abu Bakar Baasyir akhirnya melepaskan jabatannya di JI dan lebih memilih fokus membesarkan MMI. Di JI sendiri, peta kekuatan terbagi menjadi tiga faksi, kelompok moderat pendukung Abu Bakar Baasyir, kelompok radikal pengikut Hambali, dan faksi ideologis di bawah Abu Rushdan yang tetap setia pada pedoman asli organisasi (PUPJI) (Abdullah 2018).

JAT merupakan organisasi massa islam terbuka yang gerakannya berdasarkan islam sebagai pedoman hidup. Dalam melaksanakan perannya JAT mengamalkan kehidupan berjamaah. Tujuan gerakan JAT menegakkan syariat Islam dalam kerangka negara dan pemerintahan Islam. Perjuangan dilaksanakan melalui sarana dakwah, jihad, dan Amar Makruf dan Nahi Mungkar (Abdullah, 2018).

Muncul nya Jamaah Ansharu Syariah berawal dari perbedaan pendapat yang terjadi pada anggota JAT dalam menyikapi fenomena klaim khilafah islamiyah oleh Daulah Islamiyah di Iraq dan Syam (ISIS). Amir JAT Abu Bakar Baasyir telah memutuskan bahwa seluruh anggota JAT yang menolak klaim khilafah itu

dinyatakan sudah keluar dari Jamaah dan tidak lagi berada dalam ikatan JAT. Kemudian anggota JAT yang dikeluarkan dari jamaah tersebut membentuk Jamaah Ansharu Syariah yang secara resmi berdiri pada Senin, 15 Syawal 1435 H bertepatan dengan 11 Agustus 2014 di Gedung Asrama Haji Bekasi dengan mengangkat Amir Jama'ah Ustadz Mochamad Achwan. Jamaah Ansharu Syariah dalam dakwah nya menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Agenda Jamaah yang mengacu kepada aspek akidah, ukhwah islamiyah, dan kejayaan islam dan kaum muslimin (Abdullah, 2018).

Ketiga, Brigade Thaliban (BT) yang merupakan kelompok pergerakan ideologi Islam di Tasikmalaya yang mempunyai slogan *amar ma'ruf nahi munkar*, kelompok ini menjadikan dakwah sebagai misi utamanya, namun metode dan pendekatan yang diterapkan cenderung radikal atau ekstrem sehingga sering kali memicu polarisasi serta pro kontra di tengah masyarakat, khususnya di kalangan umat Muslim yang memiliki pemahaman lebih moderat, santun, dan inklusif (Kuswana, 2020).

Gerakan ini mendapatkan dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama kelompok santri, hingga akhirnya resmi dideklarasikan sebagai organisasi kemasyarakatan di Tasikmalaya pada tahun 2006 dengan nama Brigade Tholiban. Dalam kancah politik lokal dan regional, Brigade Tholiban memainkan peran yang sangat signifikan. Mereka berhasil memasarkan gagasan romantisme islam agar diakomodasi ke dalam hukum positif, seperti manifestasi ide-ide islam dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Untuk memperluas pengaruh dan melegalkan cita-cita keislamannya, kelompok BT menggunakan berbagai pendekatan, mulai

dari jalur politik lokal, narasi sejarah, hingga sentimen keagamaan. Pertumbuhan kelompok ideologis ini juga dipengaruhi oleh gerakan Islam internasional dan penetrasi teknologi informasi yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Kuswana, 2020).

Keberhasilan strategi politik BT terlihat nyata pada Pemilu 2009, di mana mereka berhasil mengantarkan satu perwakilan ke DPR RI, satu orang ke DPRD Provinsi, dan 21 orang ke DPRD Kota Tasikmalaya. Strategi politik ini dilakukan untuk mengubah ide dan cita-cita islam menjadi kebijakan hukum yang dapat diterima publik. Selain itu, iklim demokratisasi memberikan fleksibilitas bagi BT untuk berkolaborasi dan membangun koalisi dengan para pemimpin daerah demi mendapatkan dukungan kebijakan bagi pergerakan mereka (Kuswana, 2020).

Namun, kehadiran dan pergerakan BT tidak jarang memicu reaksi dari kelompok Islam lain yang lebih mapan dan bersifat non politik, seperti kalangan pesantren di Tasikmalaya. Pertentangan ini tidak hanya terbatas pada perbedaan metode dakwah, tetapi juga mencakup perbedaan pemahaman konsep etika yang bersumber dari Al-Qur'an serta perebutan pengaruh di masyarakat. Sebagai bentuk komitmen terhadap nilai-nilai Islam, BT kerap melakukan mobilisasi massa dan aksi lapangan, mulai dari tindakan *sweeping* terhadap tempat hiburan malam dan minuman keras, hingga memberikan tekanan politik kepada pemerintah daerah terkait isu eksplorasi pertambangan yang dianggap mencederai keadilan masyarakat lokal (Kuswana, 2020).

Ketiga organisasi yang menjadi fokus utama dalam penelitian terhadap Al-mumtaz ini mencerminkan keragaman gerakan yang berusaha mengintegrasikan

syariat Islam ke dalam tatanan sosial dan politik Indonesia melalui berbagai pendekatan, mulai dari formalisasi hukum hingga mobilisasi massa. Semangat serupa dalam memperjuangkan identitas dan nilai-nilai Islam secara kolektif ini juga mewarnai karakteristik serta pola pergerakan yang dijalankan oleh Almumtaz sebagai entitas yang turut berkontribusi dalam dinamika dakwah dan sosial di wilayah tersebut.

Dalam perkembangannya, Almumtaz menunjukkan pola gerakan sosial yang berangkat dari basis keagamaan sekaligus mengakar pada kultur lokal Tasikmalaya. Sebagai aliansi lintas organisasi, bentuk gerakan yang mereka jalankan tidak hanya berupa konsolidasi internal antar kelompok, tetapi juga artikulasi sikap terhadap isu-isu sosial, politik, dan keagamaan di ruang publik. Karakteristik gerakan ini dapat dilihat dari kecenderungan mereka menempatkan nilai-nilai syariat Islam dan identitas “Kota Santri” sebagai pijakan utama dalam setiap mobilisasi (Hamim, 2021).

Dalam konteks Konser Ruang Bermusik 2025 keberadaan Almumtaz tidak dapat dilepaskan dari ruang sosial dan kultural tempat ia bertumbuh. Gerakan sosial yang mereka jalankan menemukan relevansinya karena bertumpu pada landasan nilai yang telah lama hidup di masyarakat Tasikmalaya. Konsolidasi lintas ormas islam yang mereka lakukan bukan hanya menjadi forum silaturahmi internal, tetapi juga merupakan ekspresi dari sebuah kesadaran kolektif yang tumbuh dari tradisi religius masyarakat setempat. Dengan kata lain, karakteristik gerakan Almumtaz tidak lahir di ruang hampa, melainkan berakar pada struktur sosial yang telah menginternalisasi norma, simbol, dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-

hari. Situasi inilah yang membuat Almuntaaz lebih mudah memperoleh resonansi sosial, sebab isu-isu yang mereka artikulasikan kerap dipandang sejalan dengan aspirasi masyarakat luas yang telah terbiasa menempatkan nilai-nilai agama sebagai fondasi dalam merespons dinamika sosial, politik, maupun budaya (Hamim, 2021).

Penelitian mengenai gerakan sosial telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks permasalahan. Misalnya penelitian dalam Aksi Bela Islam 212 dipandang sebagai ekspresi kekecewaan terhadap kegagalan umat islam pada sistem internasional melalui populisme kanan. Dengan menggunakan analisis *framing*, media dan aktor seperti GNPf-MUI dan FPI membentuk identitas kolektif umat melalui isu penistaan agama, yang kemudian memicu konsolidasi gerakan hingga lahirnya wacana 2019 Ganti Presiden (Riadi dan Drajat, 2019)

Penelitian mengenai Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) yang menunjukkan bahwa gerakan ini berhasil membangun identitas kolektif anti-pacaran melalui tiga mekanisme penting. Pertama, ITP membentuk identitas “kita” sebagai pejuang hijrah dan penjaga kehormatan, sehingga anggota merasa memiliki tujuan bersama yang bernilai religius. Kedua, interaksi yang terjalin di media sosial melalui kampanye, diskusi, dan konten motivatif memperkuat rasa kebersamaan serta solidaritas di antara para pengikutnya. Ketiga, pengalaman masa lalu yang penuh penyesalan atau keinginan memperbaiki diri menjadi ikatan emosional yang mendorong mereka untuk aktif terlibat dalam gerakan. Melalui tiga cara tersebut, ITP berhasil menciptakan kesadaran kolektif yang kuat dan memotivasi aksi bersama melawan praktik pacaran (Rosyidah dan Damastuti, 2023).

Sementara itu penelitian tentang hijrah Islami milenial menggambarkan hijrah sebagai gerakan sosial baru yang berfokus pada perubahan diri berlandaskan ajaran Islam melalui keterlibatan aktor dan aksi kolektif. Hasilnya terlihat dari meningkatnya penggunaan hijab, partisipasi dalam kajian, pertumbuhan industri busana muslim, serta peran media sosial dalam dakwah, disertai pola pikir kritis, perilaku religius, dan tujuan hidup yang lebih terarah (Fajriani, 2019).

Kemudian penelitian tentang aksi kolektif masyarakat Desa Lembobelala menolak klaim lahan oleh PTPN XIV menunjukkan bahwa konflik agraria ini dipicu oleh benturan antara hak tanah adat dan klaim HGU yang menimbulkan ketidakpuasan. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis aksi kolektif Smelser, ditemukan bahwa ketidaksesuaian legitimasi perusahaan serta janji yang tidak terpenuhi membentuk keyakinan kolektif akan perampasan hak, dengan surat somasi menjadi pemicu mobilisasi massa dan advokasi meski upaya kontrol sosial terbatas (Damantu dan Arief, 2025).

Terakhir Penelitian tentang metamorfosis gerakan sosial di Banten menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif dan menunjukkan perubahan signifikan dari masa ke masa. Pada era kolonial hingga awal kemerdekaan (1813-1945), isu yang diangkat berkaitan dengan identitas dan ekonomi politik, dengan aktor utama seperti bangsawan, ulama, dan jawara yang berideologi pembebasan. Pada masa Orde Lama hingga Orde Baru (1945-1998), gerakan berfokus pada isu ekonomi politik, agraria, dan pendidikan, namun bersifat sporadis dan tidak sistemik dengan ideologi yang lemah. Memasuki era reformasi, gerakan menyoroti isu agraria dan lingkungan, didominasi oleh rakyat melalui *NGO*

lokal bersama ulama dan jawara, serta memiliki arah yang lebih rasional, terkoordinir, dan berlandaskan pada ideologi keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi metamorfosis gerakan sosial di Banten sejak era colonial hingga reformasi, baik dari sisi isu, aktor, dan ideologi (Alkhudri dkk., 2018).

Penelitian mengenai gerakan sosial sebelumnya umumnya berfokus pada gerakan berskala besar dan memiliki pengaruh luas dalam masyarakat. Berbagai kajian menyoroti peran organisasi keagamaan yang menggunakan identitas agama sebagai dasar untuk menjalankan aksi sosial, menegakkan nilai-nilai moral, serta membangun legitimasi di ruang publik. Di sisi lain, komunitas lokal memanfaatkan pola komunikasi tertentu untuk memperjuangkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan sosial. Beberapa studi juga mengamati transformasi gerakan sosial dari segi isu, aktor, dan ideologi yang berkembang seiring waktu, serta strategi framing media dalam membentuk persepsi publik terhadap gerakan tersebut. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa identitas memiliki posisi sentral dalam menjelaskan dinamika gerakan sosial, baik dalam dimensi praksis maupun dalam konstruksi wacana yang melingkupinya.

Dalam fenomena Ruang Bermusik 2025, pembatalan sejumlah penampilan dalam konser tersebut menghadirkan pertanyaan menarik tentang posisi dan kekuatan gerakan sosial keagamaan di tingkat lokal, juga tentang bagaimana nilai-nilai religius digunakan sebagai legitimasi tindakan kolektif di ruang publik. Bagaimana gerakan semacam ini mampu memengaruhi kebijakan dan dinamika sosial dan politik di tingkat kota?, serta sejauh mana identitas religius masyarakat

Tasikmalaya berperan dalam menentukan batas antara ekspresi budaya populer dan norma keagamaan yang dianggap pantas di ruang publik?.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada Konser Ruang Bermusik 2025 maka rumusan untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gerakan sosial Almuntaaz beroperasi dalam membatalkan Penampilan Hindia dan Lomba Sihir pada konser Ruang Bermusik 2025?
2. Bagaimana gerakan sosial Almuntaaz mempertahankan identitas Kota Santri serta memaknainya dalam ruang publik ketika berhadapan dengan ekspresi budaya populer?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui awal gerakan sosial Almuntaaz dalam Ruang Bermusik 2025 dengan menitikberatkan pada penggunaan identitas religius Kota Tasikmalaya sebagai basis gerakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana identitas Kota Santri dimaknai, dipertahankan, dan dinegosiasikan dalam ruang publik kontemporer, khususnya ketika berhadapan dengan ekspresi budaya populer dan perubahan sosial generasi muda.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai gerakan sosial berbasis identitas keagamaan di tingkat lokal. Fokus pada Almuntaaz dalam polemik konser Ruang Bermusik 2025 memberikan gambaran lebih spesifik tentang bagaimana identitas norma masyarakat lokal dan Kota Santri diartikulasikan sebagai modal gerakan.

2. Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi para aktivis Almuntaaz dalam merumuskan strategi gerakan yang lebih efektif dan tetap relevan dengan identitas Kota Santri.